



NUTRISIONIS DESA (NUSA)

Kemenkes Optimalisasi Peran Lulusan Gizi dalam Mewujudkan Generasi Bebas Stunting

Latar Belakang

- Prevalensi stunting di Indonesia (2023) yaitu 21,5%, masih jauh dari target pemerintah yaitu 14% (Kemenkes RI, 2024)
- Permasalahan kekurangan dan kualitas tenaga gizi di Indonesia sangat berkontribusi pada tingginya angka stunting (Bukit et al., 2021).
- Stunting dapat berdampak pada pertumbuhan fisik anak, perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas di masa dewasa



Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H.
Universitas Negeri Semarang



Nur Ahmad Habibi, S.Gz., M.P.
Poltekkes Kemenkes Padang



Anastu Regita Nareswara, S.Gz., M.Gz.
Poltekkes Kemenkes Jakarta II

Deskripsi Masalah

Permasalahan yang ditemukan pada tenaga gizi di Indonesia (Kemenkes RI, 2017), antara lain:



Tidak bekerja sesuai kompetensi (14%)



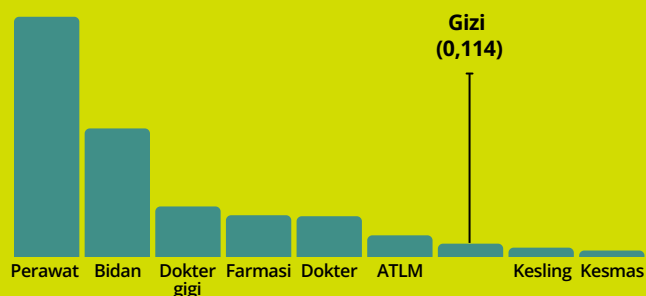
Kurang mendapat pelatihan (65%)



Belum memiliki sertifikat kompetensi (76%)

Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (Kemenkes RI, 2024)

*Rasio nakes per 1000 penduduk

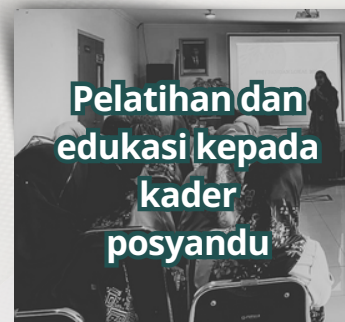


SiBijaks Award 2024

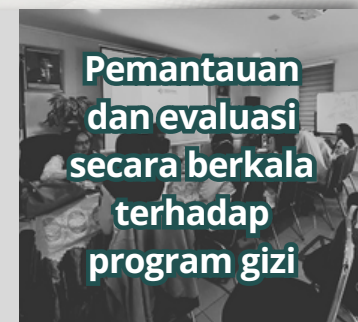
NUSA berpotensi meningkatkan cakupan dan kualitas layanan gizi, memperkuat edukasi gizi masyarakat, serta memfasilitasi deteksi dini dan penanganan stunting. **Selain itu, NUSA** dapat menciptakan lapangan kerja bagi lulusan gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat.

- Pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisisionis
- Pengembangan skema rekrutmen & penempatan lulusan gizi
- Pelatihan khusus untuk mempersiapkan nutrisisionis
- Integrasi peran nutrisisionis dengan program pemerintah
- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Integrasi Peran Nutrisisionis dengan Program Pemerintah



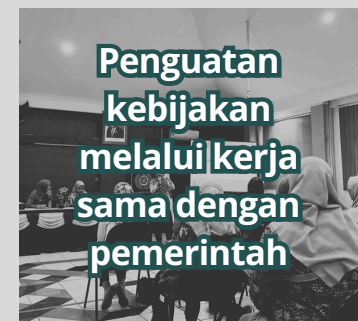
Pelatihan dan edukasi kepada kader posyandu



Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program gizi



Konsultasi gizi



Penguatan kebijakan melalui kerja sama dengan pemerintah

Pengembangan Skema Rekrutmen dan Penempatan Lulusan Gizi

Berdasarkan data kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, yang dimiliki Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Nasional dapat menindaklanjuti dengan membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan gizi. Prioritas dapat diberikan pada daerah-daerah yang memiliki **prevalensi masalah gizi tinggi**. Pemerataan ini dapat dilakukan melalui **sistem zonasi** atau **kuota khusus** untuk daerah-daerah tertentu.

Pelatihan Khusus untuk Nutrisisionis

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) menyediakan pelatihan untuk calon dan nutrisisionis, mencakup NCP, PMBA, pelatihan kader posyandu, dan gizi bencana. Tujuannya adalah membekali nutrisisionis dengan keahlian dalam menangani masalah gizi masyarakat. Pelatihan ini didukung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui modul-modul seperti Pengetahuan Dasar Gizi, Asesmen Status Gizi, Perancangan Program Intervensi Gizi, Komunikasi Efektif, dan Manajemen Program Gizi.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja



Sistem monitoring dan evaluasi kerja yang lebih efektif dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi

Metode berupa pengisian logbook secara elektronik dan menerapkan konsep Flexible Working Agreement (FWA) yang sedang disosialisasikan oleh Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan



Penerapan FWA ini akan memberikan fleksibilitas bagi ahli gizi dalam menjalankan tugasnya, baik di puskesmas maupun saat melakukan pemantauan gizi di lapangan. Sehingga ahli gizi diharapkan dapat bekerja secara optimal.

Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Nutrisisionis

Kemenkes perlu melakukan pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisisionis secara merata ke 38 provinsi

Hingga saat ini baru 9.108 (88,55%) puskesmas yang telah terpenuhi kebutuhan akan ahli gizi.

Artinya, masih terdapat 1.160 (11,45%) puskesmas yang belum memiliki ahli gizi.

Pemerataan distribusi ahli gizi yang kompeten sangat penting untuk mencapai status gizi optimal pada semua daur hidup

Latar Belakang

- Menurut data SKI 2023, prevalensi stunting di Indonesia (2023) yaitu 21,5%, masih jauh dari target pemerintah yaitu 14%
- Permasalahan kekurangan dan kualitas tenaga gizi di Indonesia sangat berkontribusi pada tingginya angka stunting
- Stunting dapat berdampak pada pertumbuhan fisik anak, perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas di masa dewasa



Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H.
Universitas Negeri Semarang



Nur Ahmad Habibi, S.Gz., M.P.
Poltekkes Kemenkes Padang



Anastu Regita Nareswara, S.Gz., M.Gz.
Poltekkes Kemenkes Jakarta II

Deskripsi Masalah

Permasalahan yang ditemukan pada tenaga gizi di Indonesia antara lain:



Tidak bekerja sesuai kompetensi (14%)



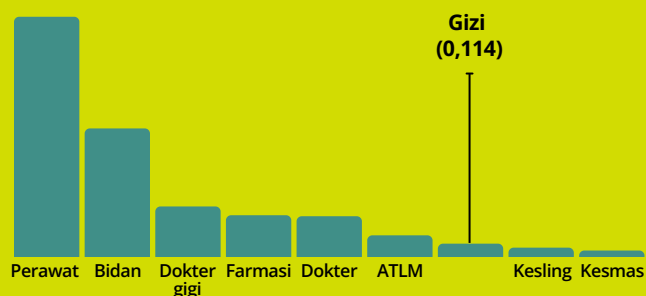
Kurang mendapat pelatihan (65%)



Belum memiliki sertifikat kompetensi (76%)

Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk

*Rasio nakes per 1000 penduduk



Kemenkes RI, 2024

Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Nutrisionis

Kemenkes perlu melakukan pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisionis secara merata ke 38 provinsi

Hingga saat ini baru 9.108 (88,55%) puskesmas yang telah terpenuhi kebutuhan akan ahli gizi.

Pemerataan distribusi ahli gizi yang kompeten sangat penting untuk mencapai status gizi optimal pada semua daur hidup

Pengembangan Skema Rekrutmen dan Penempatan Lulusan Gizi

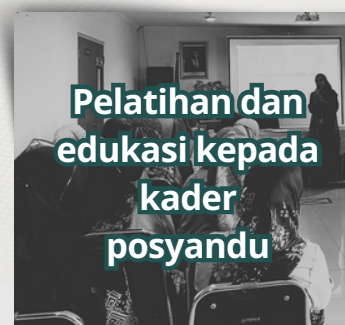
Berdasarkan data kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, yang dimiliki Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dapat menindaklanjuti dengan membuka formasi CPNS khusus lulusan gizi.

Prioritas dapat diberikan pada daerah-daerah yang memiliki **prevalensi masalah gizi tinggi**. Pemerataan ini dapat dilakukan melalui **sistem zonasi** atau **kuota khusus** untuk daerah-daerah tertentu.

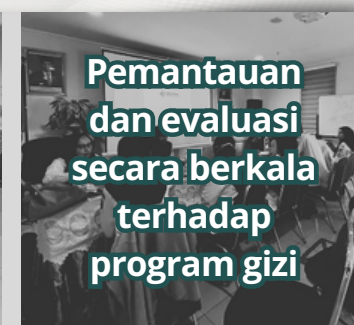
Pelatihan Khusus untuk Nutrisionis

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) menyediakan pelatihan untuk calon dan nutrisionis, mencakup NCP, PMBA, pelatihan kader posyandu, dan gizi bencana. **Tujuannya adalah membekali nutrisionis dengan keahlian dalam menangani masalah gizi masyarakat.** Pelatihan ini didukung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui modul-modul seperti Pengetahuan Dasar Gizi, Asesmen Status Gizi, Perancangan Program Intervensi Gizi, Komunikasi Efektif, dan Manajemen Program Gizi.

Integrasi Peran Nutrisionis dengan Program Pemerintah



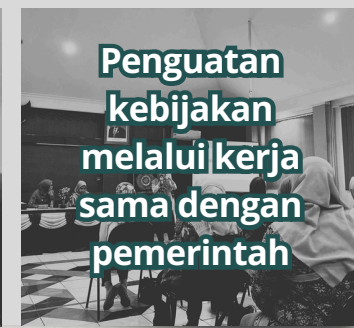
Pelatihan dan edukasi kepada kader posyandu



Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program gizi



Konsultasi gizi



Penguatan kebijakan melalui kerja sama dengan pemerintah

NUSA berpotensi meningkatkan cakupan dan kualitas layanan gizi, memperkuat edukasi gizi masyarakat, serta memfasilitasi deteksi dini dan penanganan stunting. **Selain itu, NUSA** dapat menciptakan lapangan kerja bagi lulusan gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat.

- Pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisionis
- Pengembangan skema rekrutmen & penempatan lulusan gizi
- Pelatihan khusus untuk mempersiapkan nutrisionis
- Integrasi peran nutrisionis dengan program pemerintah
- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja



Sistem monitoring dan evaluasi kerja yang lebih efektif dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi

Metode berupa pengisian logbook secara elektronik dan menerapkan konsep Flexible Working Agreement (FWA) yang sedang disosialisasikan oleh Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan



Penerapan FWA akan memberikan fleksibilitas bagi ahli gizi dalam menjalankan tugasnya, baik di puskesmas maupun saat melakukan pemantauan gizi di lapangan.

NUTRISIONIS DESA (NUSA)

Optimalisasi Peran Lulusan Gizi dalam Mewujudkan Generasi Bebas Stunting

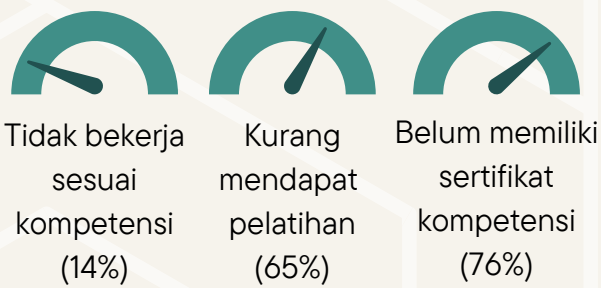


Latar Belakang

- Prevalensi stunting di Indonesia (2023) yaitu 21,5%, masih jauh dari target pemerintah yaitu 14% (Kemenkes RI, 2024a)
- Permasalahan kekurangan dan kualitas tenaga gizi di Indonesia sangat berkontribusi pada tingginya angka stunting (Bukit et al., 2021).
- Stunting dapat berdampak pada pertumbuhan fisik anak, perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas di masa dewasa

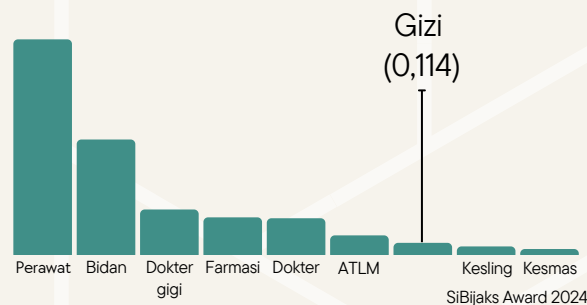
Deskripsi Masalah

Permasalahan yang ditemukan pada tenaga gizi di Indonesia (Kemenkes RI, 2017), antara lain:



Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk* (Kemenkes RI, 2024b)

*Rasio nakes per 1000 penduduk



Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Nutrisionis

Kemenkes perlu melakukan pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisionis **secara merata ke 38 provinsi**

Hingga saat ini baru 9.108 (88,55%) puskesmas yang telah terpenuhi kebutuhan akan ahli gizi.

Artinya, masih terdapat 1.160 (11,45%) puskesmas yang belum memiliki ahli gizi.

Pemerataan distribusi ahli gizi yang kompeten sangat penting untuk mencapai **status gizi optimal** pada semua daur hidup

NUSA berpotensi meningkatkan cakupan dan kualitas layanan gizi, memperkuat edukasi gizi masyarakat, serta memfasilitasi deteksi dini dan penanganan stunting. Selain itu, NUSA dapat menciptakan lapangan kerja bagi lulusan gizi dan meningkatkan status gizi masyarakat.

- Pemetaan kebutuhan dan distribusi nutrisionis
- Pengembangan skema rekrutmen & penempatan lulusan gizi
- Pelatihan khusus untuk mempersiapkan nutrisionis
- Integrasi peran nutrisionis dengan program pemerintah
- Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

Pengembangan Skema Rekrutmen dan Penempatan Lulusan Gizi

Berdasarkan data kebutuhan tenaga kesehatan, khususnya ahli gizi, yang dimiliki Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawaian Nasional dapat menindaklanjuti dengan membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus lulusan gizi. Prioritas dapat diberikan pada daerah-daerah yang memiliki **prevalensi masalah gizi tinggi**. Pemerataan ini dapat dilakukan melalui **sistem zonasi** atau **kuota khusus** untuk daerah-daerah tertentu.

Pelatihan Khusus untuk Nutrisionis

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BPPK) menyediakan pelatihan untuk calon dan nutrisionis, mencakup NCP, PMBA, pelatihan kader posyandu, dan gizi bencana. Tujuannya adalah membekali nutrisionis dengan keahlian dalam menangani masalah gizi masyarakat. Pelatihan ini didukung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui modul-modul seperti Pengetahuan Dasar Gizi, Asesmen Status Gizi, Perancangan Program Intervensi Gizi, Komunikasi Efektif, dan Manajemen Program Gizi.



Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H.
Universitas Negeri Semarang



Nur Ahmad Habibi, S.Gz., M.P.
Poltekkes Kemenkes Padang



Anastu Regita Nareswara, S.Gz., M.Gz.
Poltekkes Kemenkes Jakarta II

Integrasi Peran Nutrisionis dengan Program Pemerintah

- 1 **Pelatihan dan edukasi kepada kader posyandu**
- 2 **Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program gizi**
- 3 **Konsultasi gizi**
- 4 **Penguatan kebijakan melalui kerja sama dengan pemerintah**

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

- Sistem monitoring dan evaluasi kerja yang lebih efektif dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Metode berupa engisian logbook secara elektronik dan menerapkan konsep Flexible Working Agreement (FWA) yang sedang disosialisasikan oleh Biro Organisasi dan SDM Kementerian Kesehatan
- Penerapan FWA ini akan memberikan fleksibilitas bagi ahli gizi dalam menjalankan tugasnya, baik di puskesmas maupun saat melakukan pemantauan gizi di lapangan. Sehingga ahli gizi diharapkan dapat bekerja secara optimal.

C:75 M:0 Y:45 K:0
R:0 G:185 B:173
#00B9AD

C:20 M:0 Y:100 K:0
R:205 G:220 B:41
#CDDC229

C:74 M:0 Y:21 K:0
R:96 G:192 B:208
#60C0D0

C:45 M:38 Y:39 K:3
R:142 G:142 B:142
#8E8E8E

BS
/

C:75 M:0 Y:45 K:0
R:0 G:185 B:173
#00B9AD

C:20 M:0 Y:100 K:0
R:205 G:220 B:41
#CDDC229

C:74 M:0 Y:21 K:0
R:96 G:192 B:208
#60C0D0

C:100 M:31 Y:46 K:7
R:38 G:123 B:132
#267BB4